

References

- Aminoto. (2000). Desentralisasi dan Otonomi dalam Kerangka Negara Kesatuan. *Mimbar Hukum*, II(34), 1–7. (<http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/detail.php?dataId=2283> diakses 15 Oktober 2017).
- Bappenas & UNDP. (2008). *Study Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah 2001-2007*. www.bappenas.go.id.
- Bekkers, Victor J.J.M. (2005). *Organizing Innovation: New Approaches to Cultural Change and Intervention in Public Sector Organizations*. Amsterdam: IOS Press.
- Blank, Y. (2009). Federalism, Subsidiarity and The Role of Local Government in an Age of Global Multilevel Governance. *Fordham Urban Law Journal*, 37(2), p. 510-557.
- Denevlin, S. & Townsend, N. (2007). “Public Goods, Global Public Goods and Common Good,” *International Journal of Social Economics*, 34, pp 19-36, www.emeraldinsight.com
- Dwiyanto, Agus. (2010). “Reformasi Aparatur Daerah untuk Keberhasilan Desentralisasi di Indonesia”, dalam Wahyudi Kumorotomo dan Ambar Widaningrum (ed.). *Reformasi Aparatur Negara Ditinjau Kembali*. Yogyakarta: Gava Media, 175–205.
- El Fitri, L. S., et.al., “Pemekaran Kecamatan dalam Peningkatan Pelayanan Kependudukan Studi pada Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri,” *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, vol. 1, no. 3, pp. 115-124.
- Graham, J., et.al., (2003). Principles for Good Governance in the 21st Century, *Policy Briefs*, 15, , www.iog.ca/publications.
- Hakim, L. N., “Governance and New Mode of Governing: Indonesia as a Metaphor,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* vol. 15, no. 2, (2011), pp. 111-123.
- Halcombe, R.G. (1997). A theory of the theory of public goods. *Review of Austrian Economics*, 10(1), 1-22
- Keputusan Bupati Sleman Nomor 13/ Kep.DH/A/2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat
- Malik (2007), “Jaminan Kepastian Hukum Dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia”, *Jurnal Hukum Bisnis* Vol 26 No. 4, Tahun 2007. Hal 15-21

- Mansury, R. (1996). *Pajak Penghasilan Lanjutan*. Jakarta: Indonesia Hill-Co
- Martin FIMM, John. (1998). *Innovation Strategies in Australian Local Government*. School of Management Faculty of Business And Associate Australian Housing and Urban Research Institute Faculty of the Built Environment and Engineering Queensland University of Technology.
- Maryaningsih, dkk (2014). Pengaruh Infrastruktur terhadap Pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Volume 17, Nomor 1, Juli 2014, p. 61-98
- Monografi Kecamatan Depok, (2016).
- Muallidin, Isnaini. (2012). Implementasi Reformasi Organisasi Perizinan di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 15(3), 246-255.
- Nurcholis, Hanif. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Nurjanah, E. A. & Purwandari, H. (2012) , “Alih Fungsi Lahan Potensi Pemicu Transformasi Desa-Kota Study Kasus Pembangunan Terminal Tipe A Kertawangunan”, *JSEP* vol. 6 No. 3, 2012.
- Peraturan Bupati Sleman No. 20 Tahun 2016 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah
- Peraturan Daerah DIY Nomor 3 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan DIY
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.78 Tahun 2007 tentang Tata cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah
- Pratikno, “Good Governance dan Governability,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* vol. 8, No. 3, (2003), pp. 231-248.
- Pratikno. (2005). Good Governance dan Governability. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(3), 231-248.

- Santoso, Purwo. (2001). Merajut Kohesi Nasional: Etno-nasionalisme dan Otonomi Daerah dalam Proses Demokratisasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(3), 265-288.
- Siahaan, Marihot P. (2010). *Hukum Pajak Elementer*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Sidik, Machfud. (2002). “Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal”, Makalah disampaikan dalam Seminar “Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia”. Yogyakarta, 13 Maret. (http://storage.jakstik.ac.id/ProdukHukum/Keuangan/Keuangan_416.pdf accessed on Oct. 20, 2017).
- Sugiharta, Sri. (2012). Desentralisasi dan Sumber Daya Aparatur: Problematika Pelaksanaan Desentralisasi Pelestarian Cagar Budaya di Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 15(3), 232-245.
- Susetiawan, (2010), UU Desa: Mengembalikan Kedaulatan Menuju Pembangunan Desa Berkelanjutan: Jurnal PSPK UGM, <http://pspk.ugm.ac.id/> accessed on Oct, 23, 2017 2:04 A.M
- Susiloadi, Priyanto. (2007). “Konsep dan Isu Desentralisasi dalam Manajemen Pemerintahan di Indonesia”, dalam Spirit Publik, Vol. 3, No. 2: 117–124. (http://fisip.uns.ac.id/publikasi/sp3_2_priyanto.pdf diakses 20 Oktober 2017).
- Syaukani, dkk. (2009). *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Townsend et. al, (2007), "Public goods, global public goods and the common good", *International Journal of Social Economics*, Vol. 34 Iss 1/2 pp. 19 – 36
- Trijono, Lambang. (2001). Strategi Pemberdayaan Komunitas Lokal: Menuju Kemandirian Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 5(2), 215-235.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- UNDP (1997). *Reconceptualising Governance*, Discussion paper 2, New York, January 1997.

Weiss, Thomas (2000). 'Governance, Good Governance and Global Governance: Conceptual and Actual Challenges'. *Third World Quarterly Journal of Emerging Areas*, 21(5), pp. 795-814

Widiyahseno, Bambang. (2015). Inovasi Bupati di Ruang Demokrasi: Upaya Membangun Kesadaran Inovasi Birokrasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 18(3), 177-195.

www.asncpns.com/2016, "Jumlah PNS di Kabupaten Sleman Terus Merosot," March 10, (2016). Accessed on Oct, 23, 2017

www.bps.go.id, "Kabupaten Sleman dalam Angka," (2017).

www.bps.go.id, "Kecamatan Depok dalam Angka," (2017).

www.bps.go.id, "Kota Magelang dalam Angka," (2016)

www.bps.go.id, "Kota Salatiga dalam Angka," (2017)

www.bps.go.id, "Kota Tegal dalam Angka," (2017).

www.detik.com/berita, "Kemendagri Terima 288 Usulan Pemekaran termasuk Bogor dan Madura," August 24, (2017). Accessed on January 23, 2018

www.japantimes.co.jp/news, "Revitalizing Japan through 'Doshu-sei'," October 3, (2010). Accessed on January 28, 2018

www.kemendagri.go.id/news, "Jumlah PNS Ideal 1,5% Penduduk," Wednesday June 8, (2016). Accessed on January 23, 2018

www.metro.tokyo.jp, "Tokyo Metropolitan Government and the 23 Special Ward," (2018). Accessed on January 28, 2018

www.nytimes.com, Scott Gaylard, State need more control over the federal government, July 17, (2013), accessed on January 23, 2018

www.thoughtco.com, A Definition of Federalism: The Case Of Reinvigorating State's Right, September 26, (2017), accessed on January 23, 2018

www.un.org Good Governance.